

**SKRIPSI**

**PEMANFAATAN INFORMASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN (Studi Kasus DINAS  
PERKEBUNAN PROV.SUL-SEL)**

**ATHIRAH**

**105730416113**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2017**

**SKRIPSI**

**PEMANFAATAN INFORMASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN (Studi Kasus DINAS PERKEBUNAN  
PROV.SUL-SEL)**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar**

**OLEH:**

**ATHIRAH**

**105730416113**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2017**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal : PEMANFAATAN INFORMASI LAPORAN  
REALISASI ANGGARAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAHAN (Studi kasus DINAS  
PERKEBUNAN PROV.SUL-SEL)

Nama Mahasiswa : Athirah

No. Stambuk : 10573 0416113

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

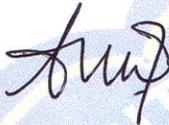
Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan panitia  
penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 pada  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  
Muhammadiyah Makassar

Makassar, juli 2017

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Muh.Amir,SE,M.Si. Ak.CA

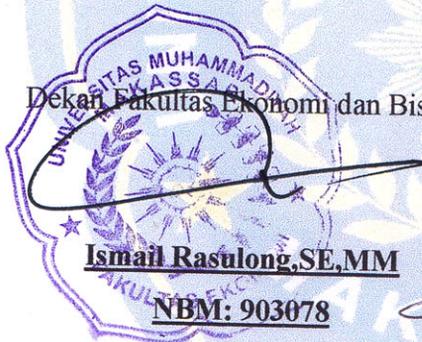


Ismail Rasulong,SE.,MM

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Jurusan Akuntansi



Ismail Rasulong,SE,MM

NBM: 903078

Ismail Badollahi, SE, M.Si. Ak.CA

NBM. 1073428

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diperiksa dan diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dengan No.125 Tahun 1438 H/2017 M dan telah dipertahankan di depan penguji pada hari Sabtu, 15 Juli 2017 M/21 Syawal 1438 H, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 17 Juli 2017

Panitia Penguji :

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE, M.M (.....)  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE, M.M (.....)  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Drs. H.Sultan Sarada, M.M (.....)  
(Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Ismail Rasulong, SE, M.M (.....)  
2. Abd.Salam HB, SE,M.Si.Ak.CA (.....)  
3. Drs. H. Hamzah Limpo. MS (.....)  
4. Dra. Hj.Lily Ibrahim, SE.M.Si (.....)

## ABSTRAK

**ATHIRAH. Pemanfaatan Informasi Laporan Realisasi Anggaran di Lingkungan Pemerintahan (Studi Kasus Dinas Perkebunan Prov.SUL-SEL)**  
Dibimbing oleh Muh Amir dan Ismail Rosulong.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pemanfaatan Informasi Laporan Realisasi Anggaran di Lingkungan Pemerintahan, Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dimana penelitian dilakukan dengan mengumpulkan, dan menganalisa data yang dikumpulkan serta gambaran yang jelas sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Hasil penelitian menunjukkan Informasi dalam laporan realisasi anggaran menjadi salah satu informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan mengenai perencanaan, pengendalian dan evaluasi atas kegiatan pemerintahan yang dilakukan sector perkebunan. Laporan realisasi anggaran akan diperoleh informasi yang berguna untuk memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima dalam periode mendatang yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah. Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan bisa lebih transparansi atau lebih terbuka dalam memberi atau membagi informasi mengenai laporan keuangannya.

***Kata kunci:** pemanfaatan informasi LRA di Lingkungan pemerintahan*

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Harapan dan keinginan orang tua*

*Adalah sasaran penjuanganku*

*Kasih sayang dan doa restu orang tua*

*Adalah penerus masa depanku*

*Butir nasehat orang tua*

*Adalah tuntunan keberhasilanku*

*Dimana ada keinginan disitu ada jalan*

*Kekuatan dan kesabaran adalah kunci kesuksesan*

*Tiada kesuksesan tanpa pengorbanan*

*Tiada kesuksesan tanpa cucuran keringat dan air mata*

*Tiada kesuksesan tanpa disertai ikhlas dan do'a*

*Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya*

*(Qs.Al Baqarah : 286)*

*Tiada pengorbanan seikhlas pengorbananmu*

*Tiada perhatian sebesar perhatianmu*

*Tiada kasih sayang setulus kasih sayangmu*

*Karenanya, ku persembahkan karya ku ini sebagai baktiku*

*Kepada ayahanda dan ibunda tercinta,*

*saudara-saudaraku tersayang, dan semua*

*yang memberikan kebahagiaan yang tak ternilai.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Penulis memanjatkan puji syukur kepada Allah swt, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Pemanfaatan Informasi Laporan Realisasi Anggaran di Lingkungan Pemerintahan (Studi kasus Dinas Perkebunan Prov.Sul-Sel)”***.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan S-1 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis dalam menyusun skripsi ini menemui hambatan dan halangan. Berkat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, hambatan dan halangan yang ditemui dalam penulisan skripsi ini dapat teratasi. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar bersama Stafnya.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE,M.Si,Ak.CA., selaku Ketua Prodi Jurusan Akuntansi.
4. Bapak H. Muh Amir ,SE.,M.Si.Ak.CA., selaku Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan dan melakukan pembetulan dengan cermat dan teliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM., selaku Pembimbing II yang telah merelakan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Kepada kedua orang tuaku yang tulus dan ikhlas selalu berdoa dan membantu baik material maupun moril demi keberhasilan penulis.
7. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak petunjuk serta dorongan yang berguna dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung, baik tersamar maupun nyata, penulis ucapkan terima kasih.
8. Teman-temanku angkatan 2013 yang penulis tidak dapat sebutkan semuanya makasih banyak buat semua bantuan dan supportnya.

Harapan penulis semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca secara umum. Secara khusus bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb***

Makassar, Juli 2017

Athirah

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
BAB I.PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	17
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	17
BAB II.TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Landasan Teori .....	19
B. Penelitian Terdahulu .....	28
C. Kerangka Pemikiran .....	34
BAB III.METODE PENELITIAN .....	36
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	36
B. Metode Pengumpulan Data .....	36
C. Jenis dan Sumber Data .....	37
D. Populasi Dan Sampel .....	37

E. Defenisi Operasional.....	38
F. Metode Analisis Data.....	39
BAB IV.GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN .....	40
A. Sejarah Dinas Perkebunan PROV.Sul-Sel .....	40
B. Visi Misi Dinas Perkebunan PROV.Sul-Sel .....	42
C. Struktur Organisasi .....	45
D. Program/ Kegiatan Dinas Perkebunan PROV.Sul-Sel .....	46
E. Tugas Pokok Dinas Perkebunan PROV.Sul-Sel .....	47
BAB V.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	49
A. Hasil Penelitian .....	49
B. Pembahasan .....	54
BAB VI.PENUTUP .....	64
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	64
DAFTAR PUSTAKA .....	66
LAMPIRAN .....	68

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Table 1 : Penelitian Terdahulu .....	29
Table 2 : Jurnal Laporan Realisasi Anggaran (Belanja Langsung 2016) .....	51
Table 3 : Jurnal Laporan Realisasi Anggaran (Belanja Tidak Langsung 2016) ...	53
Table 4 : Analisis Varians Belanja (Belanja Langsung 2016 ).....	55
Table 5 : Analisis Varians Belanja (Belanja Tidak Langsung 2016 ).....	57
Table 6 : Analisis Rasio Efisiensi Belanja (Belanja Langsung 2016 ) .....	59
Table 7 : Analisis Rasio Efisiensi Belanja (Belanja Tidak Langsung 2016 ) .....	61

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

.Laporan keuangan juga merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Tujuan laporan keuangan secara umum adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas. Informasi tersebut akan digunakan oleh sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

Laporan keuangan harus memenuhi prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Prinsip tersebut antara lain : basis akuntansi (basis akrual), prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi mengungguli bentuk formal, prinsip periodisitas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, dan prinsip penyajian wajar. Selain itu, laporan keuangan harus memiliki karakter kualitatif laporan keuangan antara lain: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Kewajiban penyusunan laporan keuangan pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran harus menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan pada kementerian

lembaga masing-masing dan disampaikan kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya Menteri Keuangan menyusun Laporan Arus Kas dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara untuk disampaikan kepada Presiden. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Gubernur/Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD dan masyarakat setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Laporan keuangan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Bentuk dan isi laporan keuangan pemerintah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan diatur secara lengkap dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pengguna dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.

Salah satu jenis laporan keuangan pemerintah yang tidak ditemui pada laporan keuangan perusahaan swasta adalah laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Laporan realisasi anggaran juga harus memenuhi karakter kualitatif laporan keuangan. Khusus untuk karakteristik kualitatif relevan, laporan

keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya mempengaruhi keputusan pengguna. Informasi dalam laporan realisasi anggaran menjadi salah satu informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan mengenai perencanaan, pengendalian dan evaluasi atas kegiatan pemerintahan yang dilakukan sector perkebunan.

Pemangku kepentingan pemerintahan membutuhkan informasi untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian di instansi pemerintahan khususnya di Dinas perkebunan prov.Sul-Sel, pemahaman atas informasi pemanfaatan laporan realisasi anggaran sangat penting untuk membuat suatu keputusan, Banyaknya informasi yang tersedia mendorong pengguna untuk selektif terhadap informasi dalam laporan keuangan tersebut dan memilih informasi yang relevan dalam membuat keputusan.

Pada instansi pemerintahan khususnya pada dinas perkebunan, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Pembangunan Sub Sektor Perkebunan di Sulawesi Selatan telah memperlihatkan peranan yang cukup berarti, hal ini ditandai dengan meningkatnya kontribusi terhadap Perekonomian Sulawesi Selatan, terutama peranannya terhadap ekspor. Keberhasilan dan kemajuan Pembangunan yang dapat dicapai tersebut merupakan implementasi dari pola pembangunan perkebunan yang selama ini dilaksanakan dengan kegiatan pokok intensifikasi, diversifikasi,

rehabilitasi dan ekstensifikasi yang didukung dengan adanya kebijakan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan.

Secara spesifik, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan (Kawedar, dkk., 2008).

Secara nasional sub sektor perkebunan memberikan kontribusi peningkatan devisa negara terbesar di luar minyak dan gas bumi serta penyerap tenaga kerja yang cukup besar. Sehubungan dengan strategi dan kebijakan pembangunan perkebunan provinsi Sulawesi Selatan, maka sasaran pembangunan perkebunan adalah peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan serta terbentuknya kawasan agribisnis perkebunan yang utuh disebut dengan pusat pengembangan perkebunan di setiap lokasi pengembangan dan sentra-sentra produksi dengan azas kebersamaan ekonomi masyarakat/kerakyatan. Petani perkebunan sebagai anggota masyarakat melalui kelembagaan petani/assosiasi/ koperasi, mempunyai peluang untuk memanfaatkan potensi ekonomi dalam kegiatan seperti Pengolahan Hasil, Pemasaran dan lain-lain.

Anggaran dimanfaatkan untuk dialokasikan dana pembangunan dalam membiayai kegiatan Pembangunan Perkebunan dan kegiatan operasional yang dialokasikan melalui dana APBD untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan melalui program-program strategis yang telah disusun. Alokasi Anggaran Pembangunan

Perkebunan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.88.019.995.999,- yang terdiri dari :

No	Laporan Belanja	Nilai (Rp)
1	Belanja Tidak Langsung	Rp.39.081.156.104,-
2	Belanja Langsung	Rp.48.938.839.895
Total		Rp.88.019.995.999,-

Anggaran di dinas perkebunan prov.sul-sel, setiap tahun mengalami perubahan, tetapi Pemanfaatan informasi laporan realisasi anggaran pada dinas perkebunan prov.sul-sel setiap tahun juga mengalami perubahan.

Pengguna harus memiliki kemampuan yang memadai untuk dapat memahami dan memanfaatkan informasi dalam laporan realisasi anggaran. Sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan laporan keuangan pemerintah daerah, maka pengguna dalam lingkungan pemerintah daerah harus memahami laporan keuangan dengan baik sehingga mampu memanfaatkannya secara optimal. Terdapat tiga unsur pengguna dalam lingkungan pemerintah daerah yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pihak eksekutif yang mengelola keuangan daerah dan membuat laporan keuangan pemerintah daerah harus dapat memanfaatkan informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah untuk keputusan perencanaan dan pengendaliannya. Pihak legislatif dalam melakukan pengawasan terhadap

pihak eksekutif juga harus dapat memanfaatkan informasi laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai kinerja dan memberikan rekomendasi. Terakhir, pihak yudikatif sebagai pemeriksa juga harus dapat memanfaatkan informasi laporan keuangan pemerintah daerah untuk menentukan hasil pemeriksaan atas kinerja dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Lanny (2012), melakukan penelitian atas Pengakuan dan Pelaporan atas Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kota Manado. Penelitian ini, menggunakan data bersifat deskriptif. Berdasarkan penelitian ini, disimpulkan untuk mengetahui dan membandingkan proses pengakuan dan pelaporan atas laporan keuangan yang diterapkan. Peneliti meneliti penggunaan laporan realisasi anggaran, dan mengacu pada PP No. 24 Tahun 2005

Fontanella (2010) menganalisis Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Pengetahuan Akuntansi Pengguna Terhadap Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa optimalisasi pemanfaatan laporan keuangan oleh pengguna sangat penting karena proses penyusunan laporan keuangan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jika pemanfaatan informasi tidak optimal maka dapat terjadi perencanaan yang tidak matang, pelaksanaan yang tidak terarah dan pengawasan yang tidak efektif.

Sebagian besar variabel yang digunakan dalam penelitian adalah pengetahuan akuntansi sehingga belum banyak menyinggung karakteristik

lain pengguna, seperti pengalaman. Pengalaman dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia. Pengalaman dapat ditentukan dengan masa kerja (Cahyadi, 2011). Melalui masa kerja yang lama, pengguna tentunya telah berpengalaman dalam masalah-masalah pemerintahan khususnya mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna.

Faktor lain yang dapat berpengaruh adalah *gender*. Pandangan terhadap *gender* seringkali dihubungkan dengan sifat yang saling bertolak belakang antara pria dan wanita. Temuan literatur psikologis kognitif dan pemasaran juga menyebutkan bahwa wanita diduga lebih efisien dan efektif dalam memproses informasi dalam pengambilan keputusan (Sabaruddinsah, 2007).

Lidia ,dkk (2015), menganalisis penyajian laporan realisasi anggaran pada dinas energy dan sumber daya mineral Minahasa Tenggara. Penelitian ini, data yang digunakan juga bersifat deskriptif. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kinerja realisasi APBD Pemerintah. Dari hasil penelitian yang dilakukan ada beberapa pertimbangan yang digunakan oleh peneliti untuk nantinya membantu dalam proses menganalisis kinerja realisasi APBD Kabupaten Minahasa Tenggara.

Pemahaman dan pemanfaatan informasi dalam laporan laporan realisasi anggaran sangat penting untuk membuat suatu keputusan

ekonomi. Salah satu bentuk pemanfaatan tersebut adalah pemilihan informasi yang relevan dalam laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan uraian sebelumnya penyusun memilih judul Pemanfaatan Informasi Laporan Realisasi Anggaran di Lingkungan Pemerintahan (Studi kasus Dinas Perkebunan Prov.Sul-Sel).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang sebelumnya, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah pemanfaatan informasi laporan realisasi anggaran di Lingkungan pemerintahan (Studi kasus Dinas Perkebunan Prov.Sul-Sel)?”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pemanfaatan informasi laporan realisasi anggaran di lingkungan pemerintahan (Studi kasus Dinas Perkebunan Prov.Sul-Sel).

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **a. Bagi penulis**

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan pemanfaatan informasi laporan realisasi anggaran di lingkungan pemerintah.

b. Bagi Dinas Perkebunan

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang penyajian laporan realisasi anggaran.

c. Bagi Akademis

Diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap laporan realisasi anggaran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Anggaran**

Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran dan manfaat yang di peroleh dari suatu kegiatan, karena pada dasarnya anggaran (*budget*) merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif dari aktivitas suatu organisasi. Untuk itu anggaran yaitu mengidentifikasi sumber daya dan komitmen yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan organisasi selama priode yang di anggarkan.(Herlianto,2015).

Anggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia,material dan sumber daya lainnya. (Anggraini,2010)

Adapun karakteristik, fungsi dan keterbatasan dan syarat-syarat anggaran, sebagai berikut:

- a) Karakteristik anggaran sebagai berikut:
1. Anggaran dapat dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan
  2. Anggaran menyangkut masa atau dalam jangka (1 tahun)
  3. Anggaran dapat dijadikan alat untuk mengukur kinerja menajer

4. Sekali di setuju anggaran hanya dapat di ubah dalam kondisi tertentu
5. Secara berkala kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggarandan perbedaanya dianalisis dan dijelaskan.

b) Anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Alat perencanaan

Anggaran digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh suatu instansi pemerintahan beserta rincian biaya yang di butuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh

2. Alat pengendalian

Dengan adanya anggaran semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat di pertanggungjawabkan.

3. Alat Komunikasi

Komunikasi meliputi penyampaian informasi yang berhubungan dengan tujuan, strategi, kebijaksanaan, rencana, pelaksanaan dan penyimpangan yang timbul. Dalam penyusunan, bebrbagai unit dan tingkatan organisasi berkomunikasi dan berperan serta dalam proses anggaran. Selanjutnya, setiap orang

yang bertanggung jawab terhadap anggaran harus dinilai mengenai prestasinya.

#### 4. Alat Koordinasi

Anggaran berfungsi sebagai alat mengkoordinasi rencana dan tindakan berbagai unit atau segmen yang ada di dalam organisasi agar dapat bekerja secara selaras kearah pencapaian tujuan.

#### 5. Alat Motivasi

Anggaran berfungsi pula sebagai alat untuk memotivasi para pelaksana di dalam melaksanakan tugas-tugas atau pencapaian tujuan.

#### c) Manfaat Anggaran

Anggaran mempunyai banyak manfaat, menurut Nafarin (2013) adalah sebagai berikut :

1. Semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama.
2. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan karyawan.
3. Dapat memotivasi karyawan.
4. Menimbulkan tanggung jawab tertentu pada karyawan.
5. Mnghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu.

6. Alat pendidikan bagi para manajer.

d) Keterbatasan anggaran

Keterbatasan anggaran menurut Abdul (2013), sebagai berikut:

1. Anggaran didasarkan pada estimasi atau proyeksi atas kegiatan yang akan datang, ketepatan dari estimasi sangat tergantung kepada pengalaman dan kemampuan dari estimasi. Ketidaktepatan anggaran berakibat tidak dapat dipakai sebagai alat perencanaan koordinasi dan pengawasan baik.
2. Anggaran harus selalu disesuaikan dengan perubahan kondisi dan asumsi, anggaran disusun atas dasar kondisi dan asumsi tertentu, perubahan kondisi dan asumsi yang mendasari penyusunan anggaran mengharuskan adanya revisi anggaran, agar anggaran tersebut dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Perubahan kondisi dan asumsi misalnya dapat berupa kebijakan pemerintah di bidang ekonomi.

Penyusunan Laporan Keuangan merupakan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang

petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan.

### **1. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Tujuan laporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasi menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur yang terdapat pada laporan realisasi anggaran terdiri dari:

- a. Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran

lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

1) Belanja Langsung

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, mengenai belanja langsung yang terdapat dalam pasal 50. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa,

2) Belanja Tidak Langsung

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 Tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, kelompok belanja tidak langsung terdiri dari belanja subsidi, hibah, bantuan social, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga.

- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, penganggaran

pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

- e. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan, sedangkan, deficit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang diantara pendapatan dan belanja selama satu periode terdapat dalam pos surplus/deficit.

## **2. Manfaat Informasi Laporan Realisasi Anggaran**

Dalam laporan realisasi anggaran akan menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan ( LRA, belanja, transfer, surplus/deficit-LRA) dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Melalui informasi yang dihasilkannya akan membantu para pengguna laporan keuangan dalam menentukan proses pengambilan keputusan selanjutnya, serta mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi dan akuntabilitas public. LRA tersebut diperoleh informasi yang menunjukkan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan :

1. Penyediaan informasi mengenai sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi
2. Penyediaan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Informasi dalam laporan realisasi anggaran menjadi salah satu informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan mengenai perencanaan, pengendalian dan evaluasi atas kegiatan pemerintahan yang dilakukan sector perkebunan. Laporan realisasi anggaran akan diperoleh informasi yang berguna untuk memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima dalam periode mendatang yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah. Laporan realisasi anggaran tersebut dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan hemat. Sesuai dengan anggaran serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggaran dimanfaatkan untuk dialokasikan dana pembangunan dalam membiayai kegiatan Pembangunan Perkebunan dan kegiatan operasional yang dialokasikan melalui dana APBD untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan melalui program-program strategis yang telah disusun. Alokasi Anggaran Pembangunan Perkebunan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.88.019.995.999,- yang terdiri dari :

No	Laporan Belanja	Nilai (Rp)
1	Belanja Tidak Langsung	Rp.39.081.156.104,-
2	Belanja Langsung	Rp.48.938.839.895
Total		Rp.88.019.995.999,-

Khusus untuk belanja tidak langsung dialokasikan untuk belanja pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Sul-Sel sebanyak 235 orang selama tahun 2016. dan sisa anggaran pada belanja tidak langsung adalah anggaran tambahan penghasilan, tunjangan beras, tunjangan keluarga tunjangan jabatan, tunjangan fungsional.

Sedangkan untuk belanja langsung dialokasikan untuk biaya operasional dari 5 (lima) program/kegiatan. Keseluruhannya dapat diukur kinerjanya dengan tingkat keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan. diantaranya yaitu:

1. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan.
2. Program Peningkatan Pasca Panen
3. Program Administrasi Perkantoran.
4. Program Peningkatan Kapasitas Dan Kinerja SKPD.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD

Pengguna harus memiliki kemampuan yang memadai untuk dapat memahami dan memanfaatkan informasi dalam laporan realisasi anggaran. Sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan laporan keuangan pemerintah daerah, pengguna dalam lingkungan pemerintah daerah harus memahami laporan keuangan dengan baik sehingga mampu memanfaatkannya secara optimal.

Suatu informasi memiliki manfaat umpan balik apabila informasi tersebut memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu. Informasi dikatakan memiliki manfaat prediktif apabila dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang, berdasarkan hasil masa lalu dengan peristiwa masa kini. Informasi laporan realisasi anggaran harus disajikan tepat waktu dan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi sehingga kekeliruan penggunaan informasi tersebut dapat dicegah untuk dapat berpengaruh dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan pengguna,

### **3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Informasi Laporan Realisasi Anggaran**

Melakukan penaksiran secara lebih akurat diperlukan beberapa penjelasan yang merupakan factor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan informasi laporan realisasi anggaran, factor-faktor tersebut, yaitu:

#### **a. Latar Belakang Pendidikan Pegawai**

Pendidikan merupakan proses menghimpun dan meningkatkan pengetahuan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Menurut instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tanggal 13 September 1974,

pendidikan juga dapat didefinisikan sebagai segala usaha untuk membina kepribadian dan mengembangkan kemampuan manusia.

Tingkat atau jenjang pendidikan dapat menjadi indikator kompetensi sumber daya manusia. Menurut UU SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003, jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

Kesesuaian jurusan juga dapat menjadi indikator kompetensi sumber daya manusia. Kesesuaian jurusan atau latar belakang pendidikan pegawai dengan pekerjaan yang dijalani dapat berpengaruh. Hal ini berkaitan dengan kualifikasi seorang pegawai/karyawan. Ketika seorang pegawai ditempatkan sesuai dengan latar belakang pendidikannya dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik.

#### b. Pengalaman

Pengalaman merupakan proses pembelajaran dan peningkatan potensi diri. Pengalaman yang dimiliki individu akan mempengaruhi pelaksanaan tugas yang diberikan kepadanya. Tingkat pengalaman yang semakin tinggi akan menghasilkan pengetahuan yang lebih baik pula. Pengalaman merupakan wakil dari pengetahuan dan keahlian sebab pengalaman memberikan pengetahuan dan kemampuan dalam memecahkan masalah dan kompleksitas tugas. Menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia, pengalaman diartikan sebagai sesuatu yang pernah dialami (dijalani, dirasakan, ditanggung).

Pengalaman yang dimiliki individu akan mempengaruhi pelaksanaan suatu tugas. Seseorang yang berpengalaman memiliki cara berpikir yang lebih terperinci, lengkap, dan rumit dibandingkan seseorang yang belum berpengalaman.

c. *Gender*

*Gender* bukan hanya pembeda antara laki-laki dan perempuan tapi juga mencakup nilai-nilai sosial yang melekat pada keduanya. Pandangan terhadap gender sering dihubungkan dengan sifat positif dan negatif (Puspitasari, 2011).

Laki-laki dianggap cenderung melakukan pemrosesan informasi secara terbatas karena pada umumnya, laki-laki tidak menggunakan semua informasi yang tersedia dan tidak memproses informasi secara menyeluruh. Berbeda dengan laki-laki, perempuan dipandang sebagai pemroses informasi yang lebih detail untuk pengambilan keputusan. Temuan literatur psikologis kognitif dan pemasaran juga menyebutkan bahwa wanita diduga lebih efisien dan efektif dalam memproses informasi untuk pengambilan keputusan (Sabaruddinsah, 2007).

d. Faktor Sosial

Faktor sosial yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi dalam penelitian Sudarno (2013) mengembangkan penelitian Thompson (1991) mencakup pernyataan tentang :

- a. Banyaknya rekan kerja yang menggunakan informasi relevan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas laporan keuangan daerah.
- b. Terdapatnya manajer senior atau atasan yang membantu dan mendorong baik dalam memperkenalkan maupun dalam memanfaatkan laporan keuangan.
- c. Perusahaan sangat membantu dalam pemanfaatan dan penggunaan neraca dalam pengambilan keputusan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian.

Faktor sosial juga dinilai dapat memberikan pengaruh terhadap pemanfaatan laporan keuangan. Faktor sosial termasuk ke dalam aspek perilaku pengguna. Faktor sosial menunjukkan pengaruh dari orang lain untuk menggunakan suatu informasi laporan keuangan. Dorongan dari orang lain dapat memberikan pengaruh dalam pemanfaatan informasi laporan keuangan. Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengguna terhadap pemanfaatan informasi dalam laporan keuangan masih terbatas. Selain itu, penelitian mengenai laporan keuangan pemerintah seringkali dilakukan secara menyeluruh, bukan secara individual.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai pemanfaatan realisasi anggaran masih sangat terbatas. Penelitian yang dilakukan lebih banyak menganalisis penggunaan laporan keuangan pemerintah oleh pihak eksternal, seperti investor dan kreditor. Sementara itu, penelitian pemanfaatan laporan keuangan pemerintah yang dilakukan di lingkungan pemerintahan sendiri masih jarang dilakukan.

Lidia ,dkk (2015), menganalisis penyajian laporan realisasi anggaran pada dinas energy dan sumber daya mineral Minahasa Tenggara. Data yang digunakan juga bersifat deskriptif. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kinerja realisasi APBD Pemerintah. Hasil penelitian yang dilakukan ada beberapa pertimbangan yang digunakan oleh peneliti untuk nantinya membantu dalam proses menganalisis kinerja realisasi APBD Kabupaten Minahasa Tenggara.

Amy (2010) menganalisis Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Pengetahuan Akuntansi Pengguna Terhadap Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa optimalisasi pemanfaatan laporan keuangan oleh pengguna sangat penting karena proses penyusunan laporan keuangan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Apabila pemanfaatan informasi tidak optimal maka dapat terjadi perencanaan yang tidak matang, pelaksanaan yang tidak terarah dan pengawasan yang tidak efektif.

Cahyadi (2011) menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, masa kerja, pelatihan, dan posisi di pemerintahan terhadap pemahaman laporan keuangan. Penelitiannya dilakukan pada eksekutif dan legislatif di Lembaga Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Cahyadi menggunakan analisis regresi berganda dengan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, masa kerja, pelatihan, dan posisi di pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman atas laporan keuangan.

Armel ,dkk (2010) menganalisis kebutuhan investor dan kreditor atas informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah. Metode pengumpulan data yang dilakukan menggunakan kuesioner yang didistribusikan secara langsung dan melalui email. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah statistik deskriptif. Untuk membandingkan antara aturan dalam pelaporan keuangan pemerintah dan informasi yang dibutuhkan investor dan kreditor. Hasil penelitian Armel ,dkk. Menunjukkan bahwa informasi keuangan, informasi kondisi ekonomi, informasi kepatuhan terhadap aturan, informasi kinerja, informasi perencanaan dan penganggaran serta informasi naratif paling dibutuhkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Aturan pelaporan keuangan pemerintah yang ada belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan investor dan kreditor. Karakteristik pengguna, yakni latar belakang pendidikan investor dan kreditor berpengaruh terhadap kebutuhan informasi dalam pelaporan keuangan daerah.

Faqihudin (2014) menganalisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Sebagai Indikator Layanan Publik. Kecenderungan yang terjadi pada perencanaan anggaran di Kabupaten /Kota terkait dengan partisipasi masyarakat adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan social masyarakat. Hal ini ditunjukkan dari jumlah dana alokasi yang menyangkut kepentingan masyarakat pada APBD masih dirasakan kurang oleh masyarakat sehingga terjadi peningkatan angka kemiskinan dan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Analisis yang digunakan dalam mengukur kinerja APBD Kota Tegal yaitu analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis efisiensi belanja, analisis pembiayaan kecuali analisis keserasian belanja menunjukkan hasil yang cukup baik sehingga dari sisi analisis ini kinerja APBD Kota Tegal menunjukkan hasil yang positif.

Ingriyani Elim,dkk (2016) menganalisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten kepulauan sangihe. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja realisasi APBD Pemerintah Kabupaten kepulauan sangihe. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan kinerja pendapatan belum efektif hal ini terlihat dari lebih kecilnya jumlah yang terealisasi dengan yang telah dianggarkan. Sedangkan untuk kinerja belanja sudah efektif hal ini dapat dilihat dari kecilnya anggaran belanja yang terealisasi

dari yang telah dianggarkan sehingga Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara melakukan penghematan dan berdampak pada adanya SILPA surplus. Meningkatkan PAD merupakan hal yang harus dilakukan untuk peningkatan pendapatan disertai penghematan belanja.

Nofranita (2011) kemudian melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui jenis informasi yang dibutuhkan oleh instansi pemerintahan. Penelitian ini menggunakan tingkat pendidikan dan pengalaman. Kesimpulannya bahwa informasi dalam laporan keuangan yang paling dibutuhkan oleh suatu instansi pemerintahan adalah informasi kepatuhan terhadap aturan, informasi kinerja, informasi perencanaan anggaran, dan informasi keuangan. Tingkat pendidikan dan pengalaman tidak berpengaruh terhadap pemilihan informasi yang dibutuhkan oleh instansi pemerintahan atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Lanny (2012), melakukan penelitian Pengakuan dan Pelaporan atas Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kota Manado. Dalam penelitian ini, data yang digunakan bersifat deskriptif. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan untuk mengetahui dan membandingkan proses pengakuan dan pelaporan atas laporan keuangan yang diterapkan. Peneliti meneliti penggunaan laporan realisasi anggaran, dan mengacu pada PP No. 24 Tahun 2005

Paat (2013) melakukan penelitian atas Perbandingan Kinerja Pengelolaan APBD antara Pemerintah Kota Tomohon dan Pemerintah Kota Manado. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa dan

membandingkan kinerja pengelolaan APBD antara Kota Tomohon dan Kota Manado. Metode yang digunakan adalah metode deksriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan kinerja Pemerintah Kota Tomohon lebih baik dari Pemerintah Kota Manado dalam mengelola APBD pada tahun anggaran 2010-2011.

Eka (2010) menganalisis kinerja pengelolaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Propinsi Sumatra Barat yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Penggunaan data dalam menganalisis adalah APBD dan Laporan Realisasi APBD Propinsi Sumatra Barat tahun 2003-2006. Teknik analisis yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan rasio keuangan yang meliputi analisis varians (selisih) anggaran pendapatan, belanja, pertumbuhan pendapatan, belanja, derajat desentralisasi, ketergantungan daerah, kemandirian efektifitas dan efisiensi PAD, efektifitas dan efisiensi pajak daerah, efisiensi belanja, kontribusi BUMD, perkembangan SILPA dan analisis investasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Propinsi Sumatra Barat dalam merealisasikan pendapatan pada tahun 2003-2006 dapat dikatakan efektif dan efisiensi, pertumbuhan pendapatan menunjukkan pertumbuhan positif. Pada tahun 2003-2006 Propinsi Sumatra masih tergantung pada pemerintah pusat sehingga penyelenggaraan desentralisasi masih rendah. Dalam merealisasikan anggaran belanja dikatakan cukup efisien dan pertumbuhan belanja menunjukkan pertumbuhan yang positif yang diimbangi dengan

pertumbuhan pendapatan. Pada pembiayaan adanya perkembangan SILPA yang bersaldo positif menunjukkan kesehatan fiskal. Kelebihan dana dialokasikan dalam bentuk investasi berupa penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga dapat meningkatkan pembangunan daerah Propinsi Sumatra Barat.

Tabel 1.

**Penelitian Terdahulu mengenai Pemanfaatan Laporan Keuangan  
Pemerintah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya**

No	Nama/Tahun	Judul Penelitian	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian
1.	Lidia (2015)	Analisis penyajian laporan realisasi anggaran pada dinas energy dan sumber daya mineral Minahasa Tenggara	Analisis statistic deskriptip	Beberapa pertimbangan yang digunakan oleh peneliti untuk nantinya membantu dalam proses menganalisis kinerja realisasi anggaran
2.	Amy (2010)	Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Pengetahuan Akuntansi Pengguna Terhadap Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Analisis statistic deskriptip	Optimalisasi pemanfaatan laporan keuangan oleh pengguna sangat penting karena proses penyusunan laporan keuangan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jika pemanfaatan informasi tidak optimal maka dapat terjadi perencanaan yang tidak matang, pelaksanaan yang tidak terarah dan pengawasan yang tidak efektif.
3.	Cahyadi	Analisis Pengaruh	Analisis Regresi	Masa Kerja, pelatihan

	(2011)	Tingkat Pendidikan, Masa Kerja, Pelatihan, dan Posisi di Pemerintahan terhadap pemahaman laporan keuangan	Berganda	dan posisi berpengaruh signifikan dan positif terhadap pemahaman laporan keuangan daerah.
4.	Armel ,dkk (2010)	Analisis Kebutuhan Investor Dan Kreditor Atas Informasi Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah	Analisis Regresi Berganda	Informasi keuangan, informasi kondisi ekonomi, informasi kepatuhan terhadap aturan, informasi kinerja, informasi perencanaan dan penganggaran serta informasi naratif paling dibutuhkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
5.	Faqihudin (2014)	Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Sebagai Indikator Layanan Publik	Metode penelitian menggunakan kajian pustaka, dan metode analisis	jumlah dana alokasi yang menyangkut kepentingan masyarakat pada APBD masih dirasakan kurang oleh masyarakat sehingga terjadi peningkatan angka kemiskinan dan penurunan tingkat kesejahteraan

				masyarakat
6.	Ingriany (2016)	Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Pendapatan pengelolaan keuangandan asset daerah kabupaten kepulauan sangihe	Analisis Statistik Deksriptif	Kinerja pendapatan belum efektif. Hal ini terlihat dari lebih kecilnya jumlah yang terrealisasi dengan yang telah dianggarkan. Sedangkan untuk kinerja belanja sudah efektif hal ini dapat dilihat dari kecilnya anggaran belanja yang terrealisasi dari yang telah dianggarkan sehingga Pemerintah Kabupaten kepulauan sangihe melakukan penghematan dan berdampak pada adanya SILPA surplus
7.	Nofranita (2011)	Pengaruh informasi keuangan yang dibutuhkan oleh instansi pemerintahan	Analisis Statistik Deksriptif	informasi kepatuhan terhadap aturan, informasi kinerja informasi perencanaan anggaran dan informasi keuangan sangat dibutuhkan, Namun Tingkat pendidikan dan pengalaman tidak berpengaruh terhadap

				kepemilikan informasi laporan keuangan.
8.	Lanny (2012)	Analisis Pengakuan dan Pelaporan atas Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kota Manado	Metode analisis,serta pengumpulan data	Mengetahui dan membandingkan proses pengakuan dan pelaporan atas laporan keuangan yang diterapkan. Peneliti meneliti penggunaan laporan realisasi anggaran, dan mengacu pada PP No. 24 Tahun 2005
9.	Paat (2013)	Perbandingan Kinerja Pengelolaan APBD antara Pemerintah Kota Tomohon dan Pemerintah Kota Manado.	Metode deksriptif.	Hasil dari penelitian menunjukkan kinerja Pemerintah Kota Tomohon lebih baik dari Pemerintah Kota Manado dalam mengelola APBD pada tahun anggaran 2010-2011.
10,	Eka (2010)	Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Sumatra Barat	pendekatan kuantitatif	Dalam merealisasikan pendapatan pada tahun 2003-2006 dapat dikatakan efektif dan efisiensi, pertumbuhan pendapatan menunjukkan pertumbuhan positif.

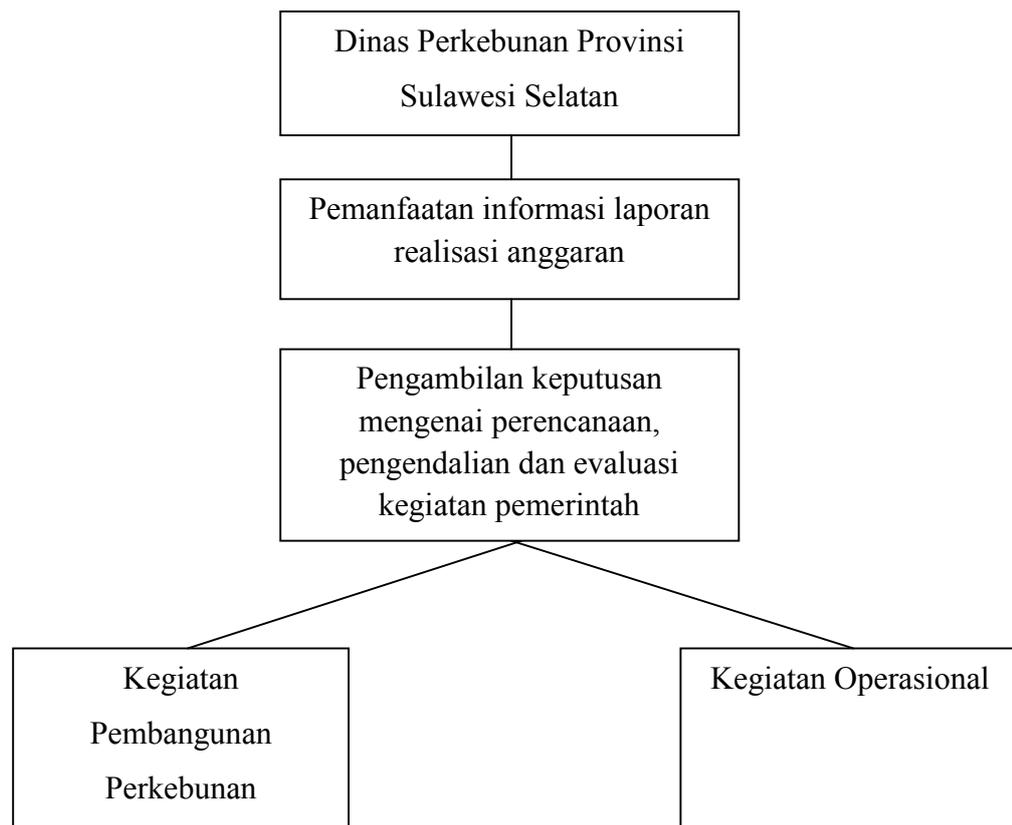
				<p>Pada tahun 2003-2006 Propinsi Sumatra masih tergantung pada pemerintah pusat sehingga penyelenggaraan desentralisasi masih rendah. Dalam merealisasikan anggaran belanja dikatakan cukup efisien dan pertumbuhan belanja menunjukkan pertumbuhan yang positif yang diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan.</p>
--	--	--	--	--

### C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka serta penelitian terdahulu, penelitian ini menganalisis pemanfaatan informasi laporan realisasi anggaran pada instansi pemerintahan (Dinas Perkebunan Prov.Sul-Sel). Untuk membantu memahami penelitian ini, diperlukan adanya suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

#### **Kerangka Pemikiran**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

##### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi/tempat penelitian dilakukan di Kantor Dinas Perkebunan Prov.sul-sel. Terletak di Jl.Perkebunan No.7 Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

##### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu kurang lebih dua bulan, yaitu dari bulan maret-Mei 2017.

#### **B. Metode Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan alat pengumpulan data untuk memperoleh data dan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung secara lisan dengan beberapa pihak yang berkepeten dan berwenang dalam memberikn data yang dibutuhkan pada badan pengelolaan keuangan dan asset daerah sehubungan dengan kebijakan pengelolaan keuangan pada pemerintah kota Makassar.
2. Observasi, bentuk metode ini merupakan pengamatan secara langsung pada keadaan yang sebenarnyadi badan pengelolaan keuangan dan asset kota Makassar.

3. Dokumentasi, yaitu melakukan penghimpunan atas data sekunder untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian ini seperti laporan realisasi anggaran.

### **C. Jenis Dan Sumber Data**

#### 1. Jenis data

- a) Data kualitatif, yaitu data yang disajikan secara deskriptif atau dalam bentuk uraian atau penjelasan serta tidak dapat diukur dalam angka-angka.
- b) Data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam skala numeric (angka).

#### 2. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Data Sekunder, yaitu data yang sudah diolah yang bersumber dari kantor pemerintahan yang diteliti..

### **D. Populasi dan Sampel**

#### a) Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Instansi pemerintah yang dimaksud mencakup unsur pimpinan/pelaksana (Dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah), unsur pengawas, dan unsur pemeriksa.

## b) Sampel

Sampel dalam penelitian ini meliputi unsur pelaksana, unsur pengawas, dan unsur pemeriksa pada instansi pemerintahan di Sulawesi Selatan. Untuk menentukan responden, metode pengumpulan sampel menggunakan *purposive sampling*. Metode ini menciptakan kriteria-kriteria tertentu yang digunakan sebagai metode pengumpulan sampel. Metode ini digunakan agar informasi tiap sampel individu tepat sasaran. Kriteria responden yang dipilih yaitu:

1. Responden memiliki tugas yang berkaitan dengan laporan keuangan instansi pemerintahan.
2. Responden memiliki tugas/hak/kewajiban dalam pengambilan keputusan berdasarkan laporan keuangan instansi pemerintahan.

## E. Defenisi Operasional

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu.

Penyandingan antara anggaran dan realisasi menunjukkan tingkat capaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas

pelaporan terhadap anggaran. Berhubung anggaran akan disandingkan dengan realisasinya maka dalam penyusunan APBD seharusnya digunakan struktur, definisi, dan basis yang sama dengan yang digunakan dalam pelaporannya.

Informasi dalam laporan realisasi anggaran menjadi salah satu informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan mengenai perencanaan, pengendalian dan evaluasi atas kegiatan pemerintahan yang dilakukan sector perkebunan. Laporan realisasi anggaran akan diperoleh informasi yang berguna untuk memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima dalam periode mendatang yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah.

#### **F. Metode Analisis Data**

Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah Metode dengan pendekatan kuantitatif yaitu analisis deskriptif yang didasarkan pada penggambaran yang mendukung analisa tersebut. Metode Deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa, dan menginterpretasikan data-data yang diperoleh dari objek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas sesuai keadaan yang sebenarnya

Dalam penelitian ini dijabarkan mengenai pemanfaatan informasi laporan realisasi anggaran oleh karenanya variable-variabel yang akan

diteliti adalah mengenai pemanfaatan laporan realisasi anggaran di lingkungan pemerintahan,.

#### 1. Analisis Varians Belanja

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi dengan anggaran. Hal penting yang harus diperhatikan dalam analisis varians ini adalah :

- 1) Mempertanyakan alasan terjadinya varians. Apakah selisih tersebut cukup beralasan dan dapat dipertanggung jawabkan?
- 2) Berapa besarnya varians?

#### 2. Analisis Rasio Efisiensi Belanja

Analisis rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio efisiensi belanja} = \frac{\text{Realisasi anggaran}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Singkat Berdirinya Dinas Perkebunan Prov.SUL-SEL**

Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan didirikan berdasarkan Surat Keterangan Gubernur Sulawesi Selatan No. : BPV / I / 49, tanggal 22 Januari 1973. Memiliki visi terwujudnya masyarakat perkebunan yang maju dan mandiri serta mengembangkan misi untuk menciptakan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha perkebunan, memberdayakan masyarakat perkebunan melalui pengelolaan sumber daya secara optimal, professional dan transparan: mengembangkan perkebunan yang berbudaya industry dengan landasan efesiensi dan berkelanjutan serta mendorong masyarakat perkebunan untuk mandiri dalam pengelolaan usaha lainnya.

Dnas Perkebunan Sulawesi Selatan telah terlibat mulai dari saat pembentukan forum kemitraan. Sampai dengan saat ini terus berpartisipasi aktif dalam ketiga kmite operasional : Penelitian dan pengembangan teknologi, alih teknologi sampai dngan pemberdayaan petani dan penguatan kelompok tani. Bersama-sama dengan beberap mitra lainnya, Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan mendukung kegiatan yang dipusatkan di soppeng, dimana lahan tersebut dapat tersedia berkat buah karya Dinas Perkebuna Provinsi Sulawesi Selatan.

Lebih lanjut Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan juga menggiatkan program sekolah lapang lagi bagi para petani maupun

petugas peyuluh lapangan. Dalam meningkatkan pengetahuan dan informasi inovasi teknologi perkebunan. Upaya lainnya ialah dengan cara memberikan bantuan pengadaan unit-unit yang dapat digunakan oleh para petani maupun koperasi, berupa mesin pengering serta pembangunan gudang-gudang untuk menampung hasil panen petani.

Meskipun kinerja pembangunan perkebunan belum optimal dipenguatan di hilir dengan basis dihilir, namun peranan dan kontribusinya selama ini telah memberikan hasil yang nyata terhadap perekonomian secara luas dan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat. Peran dan kontribusi perkebunan akan terus ditingkatkan sejalan dengan tuntutan dan perkembangan iptek serta perubahan dalam tatanan nilai baik ekonomi politik dan lingkungan hidup. Hal itu dapat dilakukan apabila potensi dan karakteristik perkebunan yang dimiliki di optimalkan seperti dari jenis komoditi, hasil produksi dan bentuk pengusahaannya, karena dapat menjadi kekuatan dan peluang yang baik untuk dikembangkan agar lebih maju, produktif dan berkelanjutan.

Potensi dan keunggulan pada komoditi perkebunan yang dimiliki terus di optimalkan yang telah banyak memberikan kontribusi yang nyata terhadap perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga menjadi harapan untuk diwujudkan sebagai wilayah perkebunan yang maju dan mandiri berbasis komoditi unggulan.

Mewujudkan arah pembangunan perkebunan dan memperhatikan potensi keunggulan local maka ditetapkan rencana strategis selama 5 tahun

kedepan yang bernuansa pada penerapan system pembangunan yang cerdas, Kreatif dan inovatif sejalan dengan tuntutan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pembangunan perkebunan kedepan di arahkan kepada penguatan hilir, yaitu pembengembangan industry yang maju yang didukung sumber daya perkebunan yang kuat melalui pemberdayaan di hulu dalam rangka meningkatkan nilai tambah, kualitas dan daya saing pemasaran serta ekspor. Dukungan basis di hulu di lakukan produktivitas dan mutu perkebunan serta juga ketersediaan input saran dan prasarana yang memadai, sehingga dapat terwujud berkembangnya penguatan di hilir untuk kemajuan pengembangan perkebunan ke depan. Maka pembangunan pekebunan adalah meningkatnya produksi dan produktifitas komoditi perkebunan dan meningkatnya pasca panen dan pemasaran hasil perkebunan hingga tahun 2018.

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Pembangunan Sub Sektor Perkebunan di Sulawesi Selatan telah memperlihatkan peranan yang cukup berarti, hal ini ditandai dengan meningkatnya kontribusi terhadap Perekonomian Sulawesi Selatan, terutama peranannya terhadap ekspor. Keberhasilan dan kemajuan Pembangunan yang dapat dicapai tersebut merupakan implementasi dari pola pembangunan perkebunan yang selama ini dilaksanakan dengan kegiatan Pokok Intensifikasi, Diversifikasi, Rehabilitasi dan Ekstensifikasi yang didukung dengan adanya kebijakan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan.

## **B. V i s i dan Misi**

### **1. Visi**

Visi Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan adalah merupakan penjabaran dari visi Provinsi Sulawesi Selatan dan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sbb :

Berdasarkan Garis-Garis Besar Haluan Pembangunan Daerah (GBHD) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) Propinsi Sulawesi Selatan ditegaskan bahwa visi Sulawesi Selatan sampai Tahun 2028 adalah sbb :

***“Sulawesi Selatan Menjadi Wilayah Terkemuka Di Indonesia Melalui Pendekatan Kemandirian Lokal Yang Bernafaskan Keagamaan”***

Bahwa dengan memperhatikan kewenangan otonomi Provinsi Sulawesi Selatan sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP 25 Tahun 2000, serta memperhatikan analisis perkembangan lingkungan strategis, maka dirumuskan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2008 - 2013 sebagai berikut :

***“ Sulawesi Selatan Sebagai Provinsi Sepuluh Terbaik Dalam Pelayanan Hak Dasar Yang Didukung Kelembagaan Pemerintah Yang Terpercaya “***

Sejalan dengan kedua rumusan visi tersebut di atas dan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Perda Nomor 9 tahun 2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan dirumuskan Visi sebagai berikut :

***“Terwujudnya Perkebunan,Maju Berbasis Komoditi Unggulan Dalam Mendukung Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional “***

Perwujudan dari visi perkebunan tersebut memuat makna-makna sebagai berikut :

1. Perkebunan maju adalah : perkebunan yang berbasis teknologi dengan memanfaatkan sumber daya.
2. Komoditi unggulan adalah : komoditi perkebunan lokal yang mempunyai nilai ekonomi dan daya saing yang tinggi.

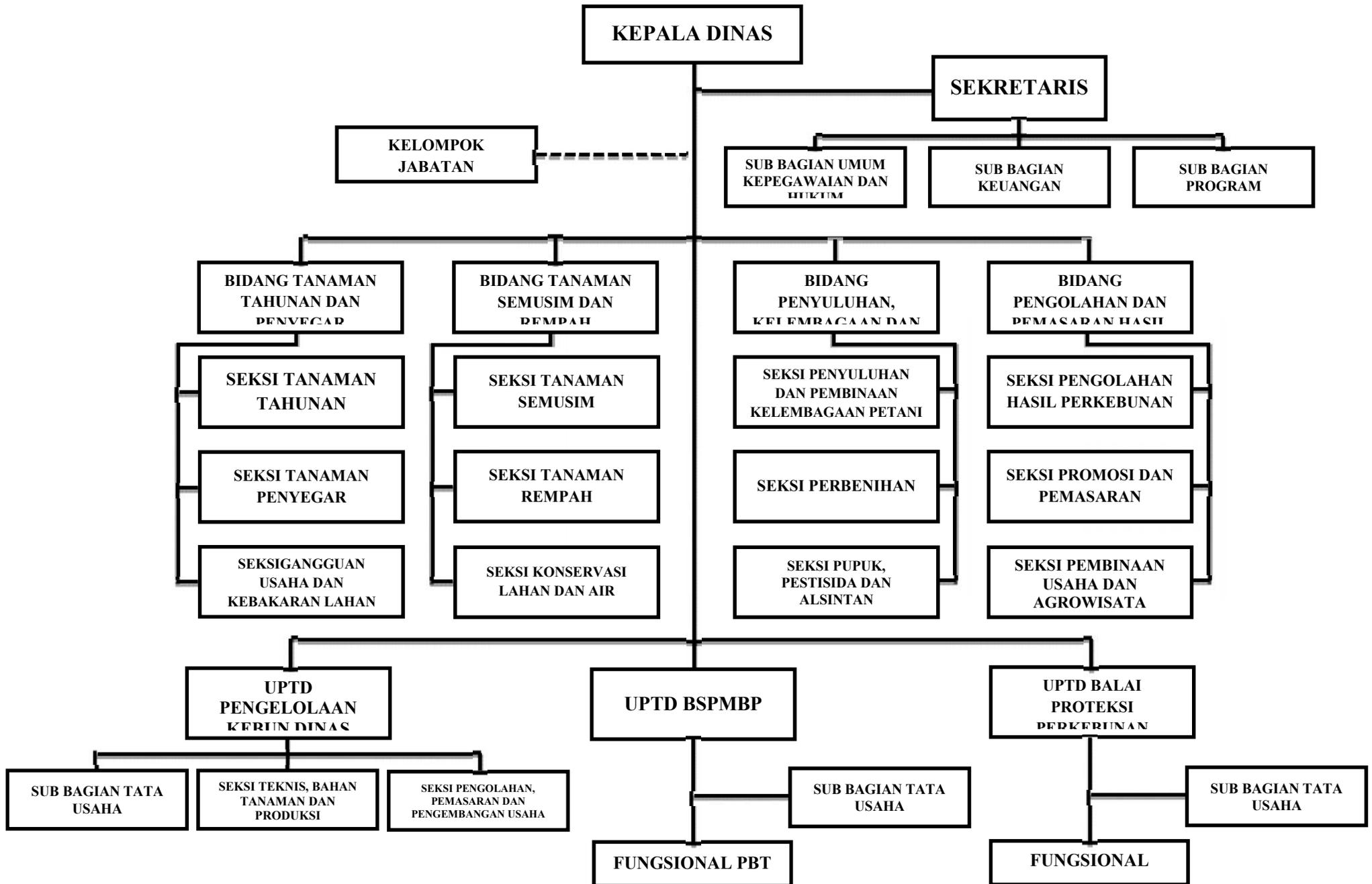
3. Pilar utama pembangunan nasional adalah : posisi sulawesi selatan pada tahun 2018 sebagai acuan pembangunan nasional dan berkontribusi nyata terhadap solusi persoalan bangsa indonesia.

## **2. Misi**

Misi Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

- Mengembangkan Perkebunan yang maju, produktif dan berkualitas melalui penguatan komoditi unggulan lokal.
- Mendorong peningkatan nilai tambah produksi hasil perkebunan melalui pengembangan sarana pengolahan.

C. STRUKTUR DINAS PERKEBUNAN PROV. SULAWESI SELATAN UU. 23 TAHUN 2015 DAN PP.18 TAHUN 2016



#### **D. Program Dan Kegiatan Dinas Perkebunan**

Dinas Perkebunan Prov.Sulawesi Selatan mempunyai beberapa kegiatan selama tahun anggaran berjalan,yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatan :
  - a. Penyediaan jasa administrasi
  - b. Pelayanan barang dan jasa administrasi
2. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD, kegiatan :
  - a. Pembinaan aparatur dan pengembangan kehumasan
  - b. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
  - c. Penyediaan sarana dan prasarana BPTP2MB dan sertifikasi benih perkebunan
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD, kegiatan :
  - a. Koordinasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan perkebunan
4. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas tanaman perkebunan, kegiatan :
  - a. Pembinaan dan pengembangan tanaman tahunan
  - b. Pembinaan dan pengembangan tanaman semusim
  - c. Pembinaan dan pengembangan bibit komoditi unggulan perkebunan
  - d. Pembinaan dan penyediaan pupuk dan pertisida
  - e. Pembinaan dan penyediaan alat dan mesin perkebunan

- f. Pembinaan dan konservasilahan dan air
  - g. Pembinaan dan pengendalian OPT dan gangguan usaha perkebunan
  - h. Pengamatan, peramalan hama, penyakit dan gulma tanaman perkebunan
  - i. Penguatan kelembagaan petani dan pembinaan usaha perkebunan
  - j. Proteksi tanaman, pengawasan dan pengujian, mutu benih,sertifikasi benih perkebunan
5. Program Peningkatan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Perkebunan, kegiatan :
- a. Pembinaan peningkatan mutu dan pengembangan pengolahan.

## **E. Tugas Pokok dan Fungsinya**

Dinas Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perkebunan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan meliputi pengembangan dan pembinaan usaha perkebunan, sarana prasarana perkebunan, perlindungan perkebunan dan pascapanen serta system informasi perkebunan.
- b. Penyelenggaraan pelayanan dalam bidang perkebunan yang meliputi pengembangan dan pembinaan usaha perkebunan, sarana prasarana perkebunan, perlindungan perkebunan dan pasca panen dan sistem informasi perkebunan.
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang perkebunan yang meliputi pengembangan dan pembinaan usaha perkebunan, sarana prasarana perkebunan, perlindungan perkebunan, dan pasca panen dan sistem informasi perkebunan.
- d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Penyajian laporan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam Pengambilan keputusan mengenai perencanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemerintah. Pada Dinas Perkebunan Sulawesi Selatan menyajikan informasi berupa laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan dan dilaporkan pada pihak yang bertanggung jawab.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah salah satu komponen laporan keuangan Pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan juga menyajikan informasi tentang laporan keuangan serta laporan realisasi anggaran terhadap seluruh transaksi dalam satu periode pelaporan.

Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan memisahkan antara anggaran dan realisasinya untuk eksploitasi dan produksi, karena untuk memperjelas bagian-bagian biaya dan komponen-komponen dari masing-masing belanja. Pada table perbandingan antara anggaran dan realisasi yang dianalisis, dalam hal ini ini belanja langsung dan tidak langsung terdapat kolom persentase(%), untuk melihat besarnya anggaran yang telah direalisasi.

Dapat diketahui bahwa Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Serta dapat diketahui Pemanfaatan Laporan realisasi Anggaran pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan memanfaatkan informasi tersebut untuk kegiatan belanja, kegiatan tersebut dibagi dua bagian yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. juga dapat dilihat kegiatan belanja langsung dan tidak langsung dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan dimana nilai ini merupakan nilai yang berhasil direalisasikan selama tahun anggaran 2016.

#### **1. Analisis Pemanfaatan Informasi Laporan Realisasi Anggaran Pada Belanja Langsung (Kegiatan Operasional)**

Belanja langsung dialokasikan untuk biaya operasional dari 5 (lima) program/kegiatan. Keseluruhannya dapat diukur kinerjanya dengan tingkat keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan.

Berikut adalah tabel Jurnal Belanja Langsung Berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010 :

**Tabel 2.**  
**Jurnal Laporan Realisasi Anggaran**  
**(Belanja Langsung)**

No	Transaksi	Jurnal	Debet	Kredit
1	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman perkebunan	Belanja Lain-lain  Kas	Rp. 37.126.559.256	Rp.37.126.559.256
2	Program Peningkatan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Belanja Lain-lain  Kas	Rp.5.450.603.200	Rp. 5.450.603.200
3	Program Administrasi Perkantoran	Belanja Lain-lain  Kas	Rp.2.976.474.656	Rp. 2.976.474.656
4	Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD	Belanja Lain-lain  Kas	Rp.1.781.642.583	Rp. 1.781.642.583
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD	Belanja Lain-lain  Kas	Rp.1.603.560.200	Rp. 1.603.560.200
Jumlah			Rp.48.938.839.895	Rp.48.938.839.895

Tabel 2 menunjukkan kegiatan ataupun program yang telah di jalankan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana kegiatan atau program tersebut membutuhkan dana untuk merealisasikan program-program tersebut. Program yang banyak membutuhkan dana yaitu Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman perkebunan yang menggunakan dana sebesar Rp. Rp. 37.126.559.256,-

## **2. Analisis Informasi Laporan Realisasi Anggaran pada Belanja Tidak Langsung (Biaya Pembangunan Perkebunan)**

Belanja tidak langsung dialokasikan untuk belanja pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Sul-Sel selama tahun 2016.dan sisa anggaran pada belanja tidak langsung adalah anggaran tambahan penghasilan,tunjangan beras, tunjangan keluarga tunjangan jabatan, tunjangan fungsional.

**Tabel 3.**  
**Jurnal Laporan Realisasi Anggaran**  
**(Belanja Tidak Langsung)**

No	Transaksi	Jurnal	Debet	Kredit
1	Belanja Pegawai	Belanja Pegawai Kas	Rp.19.540.578.052	Rp.19.540.578.052
2	Gaji pokok/Uang Representatif	Belanja Pegawai Kas	Rp.11.256.025.240	Rp.11.256.025.240
3	Tunjangan Keluarga	Belanja Pegawai Kas	Rp.916.700.169	Rp.916.700.169
4	Tunjangan Jabatan	Belanja Pegawai Kas	Rp.290.290.000	Rp.290.290.000
5	Tunjangan Fungsional	Belanja Pegawai Kas	Rp.284.315.000	Rp.284.315.000
6	Tunjangan Fungsional umum	Belanja Pegawai Kas	Rp.425.700.000	Rp.425.700.000
7	Tunjangan Beras 1	Belanja Pegawai Kas	Rp.585.206.100	Rp.585.206.100
8	Tunjangan PPH	Belanja Pegawai Kas	Rp.262.155.850	Rp.262.155.850
9	Pembulatan gaji	Belanja Pegawai Kas	Rp.140.970	Rp.140.970
10	Iuran Asuransi Kesehatan	Belanja Pegawai Kas	Rp.313.113.316	Rp.313.113.316
11	Iuran Kematian	Belanja Pegawai Kas	Rp.78.137.471	Rp.78.137.471
12	Tambahan Penghasilan PNS	Belanja Lain-Lain Kas	Rp.5.037.293.936	Rp.5.037.293.936
13	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Belanja Lain-Lain Kas	Rp.91.500.000	Rp.91.500.000
Jumlah			Rp. 39.081.156.104	Rp. 39.081.156.104

Table 3, menunjukkan kegiatan belanja tidak langsung Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan belanja tidak langsung tersebut terdiri dari belanja pegawai, gaji dan tunjangan-tunjangan. Belanja tidak langsung tersebut telah direalisasikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

## **B. Pembahasan**

### **1. Analisis Varians Belanja**

Berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2016, secara umum terdapat selisih anggaran belanja. Hal ini mengindikasikan adanya efisiensi atau penghematan anggaran. Jumlah penghematan tersebut jika dilihat dari persentasenya memang tidak begitu besar, namun jika dilihat dari nominalnya cukup signifikan dan dapat dikatakan Dinas Perkebunan Prov.Sul-Sel memiliki kinerja yang cukup baik dalam penghematan anggaran belanja.

**Tabel 4.**  
**Analisis Varians Belanja**  
**(Belanja Langsung 2016)**

No	Transaksi	Anggaran	Realisasi	Selisih
1	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman perkebunan	Rp.37.694.446.783	Rp. 37.126.559.256	Rp. 567.887.527
2	Program Peningkatan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Rp.5.379.080.884	Rp.5.450.603.200	(Rp. 71.522.316)
3	Program Administrasi Perkantoran	Rp. 3.058.580.000	Rp.2.976.474.656	Rp. 82.105.344
4	Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD	Rp.1.793.300.000	Rp.1.781.642.583	Rp. 11.657.417
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD	Rp.1.640.000.000	Rp.1.603.560.200	Rp. 36.439.800
Jumlah		Rp.49.565.407.667	Rp.48.938.839.895	Rp. 626.567.772

Tabel 4, menunjukkan kegiatan atau program belanja langsung yang telah direalisasikan selama tahun 2016. Sebelum kegiatan atau program tersebut dijalankan telah dilakukan perencanaan anggaran tetapi dalam perealisasiannya terdapat selisih lebih atau kurang pengeluaran pembiayaan. Anggaran yang ditetapkan berjumlah Rp.49.565.407.667,- namun dalam perealisasiannya mengalami selisih kurang lebih Rp. 626.567.772 dengan total Rp.48.938.839.895,-

Tabel 4, Pada Program Peningkatan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Perkebunan realisasinya mencapai Rp.5.450.603.200, sedangkan anggarannya sebesar Rp.5.379.080.884 ini berarti meningkat Rp. 71.522.316, hal ini disebabkan adanya pemborosan belanja yang sangat drastis dan ada beberapa belanja yang tidak dianggarkan sebelumnya.

**Tabel 5.**  
**Analisis Varians Belanja**  
**(Belanja Tidak Langsung 2016)**

No	Transaksi	Anggaran	Realisasi	Selisih
1	Belanja Pegawai	Rp.19.790.185.270	Rp. 19.540.578.052	Rp.249.607.218
2	Gaji Pokok/Uang Representatif 1	Rp.11.278.437.736	Rp.11.256.025.240	Rp. 22.412.496
3	Tunjangan Keluarga	Rp. 921.109.484	Rp.916.700.169	Rp. 4.409.315
4	Tunjangan Jabatan 2	Rp.290.290.000	Rp.290.290.000	0
5	Tunjangan Fungsional	Rp.284.962.500	Rp.284.315.000	Rp. 647.500
6	Tunjangan Fungsional Umum	Rp.427.394.000	Rp.425.700.000	Rp. 1.694.007
7	Tunjangan Beras 1	Rp.585.246.584	Rp.585.206.100	Rp. 40.484
8	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	Rp.263.385.811	Rp.262.155.850	Rp. 1.229.961
9	Pembulatan Gaji	Rp.339.912	Rp.140.970	Rp. 198.942
10	Iuran Asuransi Kesehatan	Rp.314.937.685	Rp.313.113.316	Rp. 1.824.369
11	Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja/Kematian	Rp.78.714.453	Rp.78.137.471	Rp. 576.982
12	Tambahan Penghasilan PNS	Rp.5.253.867.105	Rp.5.037.293.936	Rp.216.573.169
13	Insentif pemungutan Retribusi Daerah	Rp.91.500.000	Rp.91.500.000	0
Jumlah		Rp.39.580.370.540	Rp. 39.081.156.104	Rp.499.214.436

Tabel 5, menunjukkan bahwa belanja tidak langsung pada tahun anggaran 2016 mengalami perubahan yang sebelumnya di anggarkan sebesar Rp.39.580.370.540,- setelah direalisasi mengalami perubahan, sekitar Rp.499.214.436 sehingga menjadi Rp. 39.081.156.104,-.

Tabel 5, dalam hal ini belanja pegawai realisasi sebesar Rp. 19.540.578.052, sedangkan anggaran sebesar Rp.19.790.185.270 ini berarti ada tingkat efisiensi sebesar Rp.249.607.218, hal ini disebabkan adanya penghematan belanja yang dialokasikan untuk peningkatan kinerja pegawai.

## **2. Analisis Rasio Efisiensi Belanja**

Analisis rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio efisiensi belanja} = \frac{\text{Realisasi anggaran}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

**Tabel 6.**  
**Analisis Rasio Efisiensi Belanja**  
**(Belanja Langsung 2016)**

No	Transaksi	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman perkebunan	Rp.37.694.446.783	Rp. 37.126.559.256	0,99%
2	Program Peningkatan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Rp.5.379.080.884	Rp.5.450.603.200	(1,01%)
3	Program Administrasi Perkantoran	Rp. 3.058.580.000	Rp.2.976.474.656	0,97%
4	Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD	Rp.1.793.300.000	Rp.1.781.642.583	0,99%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD	Rp.1.640.000.000	Rp.1.603.560.200	0,97%
Jumlah		Rp.49.565.407.667	Rp.48.938.839.895	0,99%

Tabel 6, menunjukkan kegiatan atau program belanja langsung yang telah direalisasikan selama tahun 2016. Sebelum kegiatan atau program tersebut dijalankan telah dilakukan perencanaan anggaran. Namun, Program Peningkatan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Perkebunan realisasinya mencapai Rp.5.450.603.200, sedangkan anggarannya sebesar Rp.5.379.080.884 ini berarti meningkat 1,01% , hal ini disebabkan adanya pemborosan belanja yang sangat drastis dan ada beberapa belanja yang tidak dianggarkan sebelumnya.

**Tabel 7.**  
**Analisis Rasio Efisiensi Belanja**  
**(Belanja Tidak Langsung 2016)**

No	Transaksi	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	Rp.19.790.185.270	Rp. 19.540.578.052	0,98%
2	Gaji Pokok/Uang Representatif 1	Rp.11.278.437.736	Rp.11.256.025.240	0,99%
3	Tunjangan Keluarga	Rp. 921.109.484	Rp.916.700.169	0,99%
4	Tunjangan Jabatan 2	Rp.290.290.000	Rp.290.290.000	0,00%
5	Tunjangan Fungsional	Rp.284.962.500	Rp.284.315.000	0,99%
6	Tunjangan Fungsional Umum	Rp.427.394.000	Rp.425.700.000	0,99%
7	Tunjangan Beras 1	Rp.585.246.584	Rp.585.206.100	0,99%
8	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	Rp.263.385.811	Rp.262.155.850	0,99%
9	Pembulatan Gaji	Rp.339.912	Rp.140.970	0,42%
10	Iuran Asuransi Kesehatan	Rp.314.937.685	Rp.313.113.316	0,99%
11	Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja/Kematian	Rp.78.714.453	Rp.78.137.471	0,99%
12	Tambahan Penghasilan PNS	Rp.5.253.867.105	Rp.5.037.293.936	0,96%
13	Insentif pemungutan Retribusi Daerah	Rp.91.500.000	Rp.91.500.000	0,00%
Jumlah		Rp.39.580.370.540	Rp. 39.081.156.104	0,99%

Tabel 7, menunjukkan bahwa belanja tidak langsung pada tahun anggaran 2016 mengalami perubahan yang sebelumnya di anggarkan sebesar Rp.39.580.370.540,- setelah direalisasi mengalami perubahan,sekitar 0,99% sehingga menjadi Rp. 39.081.156.104,-.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Penyajian adalah suatu proses, dan cara untuk menyediakan menyampaikan suatu laporan. Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan.menyampaikan laporan keuangan dan laporan realisasi anggaran terhadap seluruh kegiatan ataupun transaksi yang telah dilakukan. Dimana laporan keuangan mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran juga menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislative dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terlihat dari hasil penelitian dan data laporan keuangan dan realisasi Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan sudah mencapai target-target yang telah disepakati serta mengalami peningkatan dari anggaran yang telah atau sudah di tetapkan. Kinerja keuangan terlihat cukup berhasil karena hampir mendekati target anggaran yang telah

ditetapkan dengan kata lain presentase pencapaian atas realisasi tidak begitu jauh dari yang dianggarkan.

Informasi dalam laporan realisasi anggaran menjadi salah satu informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan mengenai perencanaan, pengendalian dan evaluasi atas kegiatan pemerintahan yang dilakukan sector perkebunan. Laporan realisasi anggaran akan diperoleh informasi yang berguna untuk memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima dalam periode mendatang yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan pembahasan Mengenai Pemanfaatan Informasi Laporan Realisasi Anggaran di Lingkungan Pemerintahan (Studi kasus Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan) maka kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis sebagai berikut:

Informasi dalam laporan realisasi anggaran menjadi salah satu informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan mengenai perencanaan, pengendalian dan evaluasi atas kegiatan pemerintahan yang dilakukan sector perkebunan. Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan menyajikan informasi berupa laporan keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan dilaporkan pada pihak yang bertanggung jawab.

#### **B. Saran**

Setelah mempelajari , menganalisis dan menarik kesimpulan maka penulis akan memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan antara lain :

1. Sebaiknya, jika anggaran pendapatan dan belanja sudah di buat pada tahun berjalan akan digunakan sebagai dasar acuan. Perlu dipertimbangkan factor-factor yang akan terjadi pada pemanfaatan informasi laporan realisasi anggarannya.

2. Sehubungan dengan realisasi pendapatan lebih kecil dari anggaran. Hal ini disebabkan karena anggaran yang diajukan terlalu besar maka disarankan agar Dinas Perkebunan Prov.Sulawesi Selatan mengajukan anggaran pendapatan disesuaikan dengan kebutuhan yang sesungguhnya.
3. Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan harus lebih transparansi atau lebih terbuka terhadap informasi mengenai laporan keuangan sehingga menjadi panutan bagi dinas-dinas yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian lebih dalam laporan keuangannya karena peneliti hanya membahas pemanfaatan informasi laporan realisasi anggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cahyadi, Dwi. 2011. *“Pengaruh Tingkat Pendidikan, Masa Kerja, Pelatihan, dan Posisi di Pemerintahan Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Daerah”*.Banjarnegara
- Elim Ingriani, dkk 2015. *“Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Pendapatan pengelolaan keuangandan asset daerah kabupaten kepulauan sangihe”*. Jurnal EMBA Vol. 4 No. 1, ISSN 2303-1174 Hal 1473-1484
- Faqihudin, M. 2014. *Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Sebagai Indikator Layanan Publik. Jurnal Ekonomi. Universitas Pancasakti Tegal. Vol. 1 No. 3 Hal.1-22.*
- Fontanella, Amy. 2010. *Analisis Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Pengetahuan Akuntansi Pengguna Terhadap Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Politeknik Negeri Padang. Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol. 5, No. 2, ISSN 1858-1687 hal. 2230.*
- Hafis, Abdul, 2013. *”Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis AkruaI”*. Edisi 1.Bandung : Penerbit Alfabeta
- Herlianto,Didit.2015.”*AnggaranKeuangan* ”,Edisi 1.Yogyakarta: Alfabeta
- Kawedar, dkk., 2008. *” Analisis Laporan Keuangan Pemerintah”*.Semarang
- Lanny, 2012. *“Analisis Pengakuan, Pengukuran, dan Pelaporan atas Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendidikan Kota Manado”*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Hal.59-63.
- Mawikere, Lidia dkk., 2015. *“Analisis penyajian laporan realisasi anggaran pada dinas energy dan sumber daya mineral”*. Kabupaten Minahasa Tenggara: *Jurnal*. ISSN 2303-1174 Vol.3 No.2 Hal. 82-89.
- Nafarin, M, 2013. *Penganggaran perusahaan*, edisi ke 3, Salemba empat, Jakarta

- Nofranita.2011. *"informasi kepatuhan terhadap aturan, informasi kinerja, informasi perencanaan anggaran, dan informasi keuangan "*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Puspitasari, 2011. *'Nilai-Nilai Sosial Terhadap Gender '*.Yogyakarta
- Rosalina, Eka. 2010 *"Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (Studi Kasus di Propinsi Sumatra Barat"* .(Thesis S2). Universitas Gadjah Mada
- Sabaruddinsah, 2007. *'Pengaruh Gender Dalam Pengambilan Keputusan''*. Semarang : Temuan literatur psikologis kognitif
- Selly Paat.(2013), *"Perbandingan Kinerja Pengelolaan APBD antara Pemerintah KotaTomohon dengan Pemerintah Kota Manado"* . Skripsi. Universitas Sam Ratulangi.Manado
- Sudarno, Santoso A.2013. *"Faktor sosial yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi dalam penelitian"* Jakarta.
- Yentifa, Armel dkk. 2010,*"Aplikasi Analisis Multivariate Program SPSS 19"*. Cetakan Ke Empat, Universitas Diponegoro: Semarang.

L

A

M

P

I

R

A

N

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Pertanyaan-pertanyaan berikut merupakan sumber dari wawancara dengan salah satu pegawai Dinas Perkebunan Prov.SUL-SEL.

1. Bagaimana Sejarah Dinas Perkebunan Prov.SUL-SEL?
2. Apa visi misi Dinas Perkebunan Prov.SUL-SEL?
3. Apakah Informasi Laporan realisasi anggarannya sudah di manfaatkan dengan benar?
4. Apakah realisasinya sesuai dengan anggaran yang telah di anggarkan?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ATHIRAH, lahir d Ujung Pandang pada tanggal 7 Mei 1995. Anak pertama dari dua bersaudara yakni. Muh Alwi, dari pasangan Ruslan Umar dan Hj.Hastia. Jenjang Pendidikan yang diikuti mulai dari SDI Perumnas Antang III Makassar tamat pada tahun 2006, pada tahun yang sama melanjutkan ketingkat SMPN 20 Makassar tamat pada tahun 2009, kemudian melanjutkan di SMK Wahyu 1 Makassar di tahun yang sama dan tamat pada tahun 2013

Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan ditingkat perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi Akuntansi (S1) di Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis Menyusun skripsi dengan judul : **“Pemanfaatan Informasi Laporan Realisasi Anggaran di Lingkungan Pemerintahan (Studi kasus Dinas Perkebunan PROV.sul-sel)”**